



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2027

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

Pemalang, 10 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II.....	12
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang	21
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III.....	39
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV	46
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V.....	56
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
5.1. Indikator Kinerja Utama	56
5.2. Indikator Kinerja Kunci.....	56
BAB VI.....	58
PENUTUP.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang 13

Tabel II. 2 Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2024 dan 2025.....22

Tabel II. 3 Analisis SWOT27

Tabel II. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.....30

Tabel II. 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat37

Tabel III. 1 Capaian Kinerja24

Tabel IV. 1 Matrik Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 202747

Tabel V. 1 Indikator Kinerja Utama56

Tabel V. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan alur penyusunan Renja SKPD2

J. RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

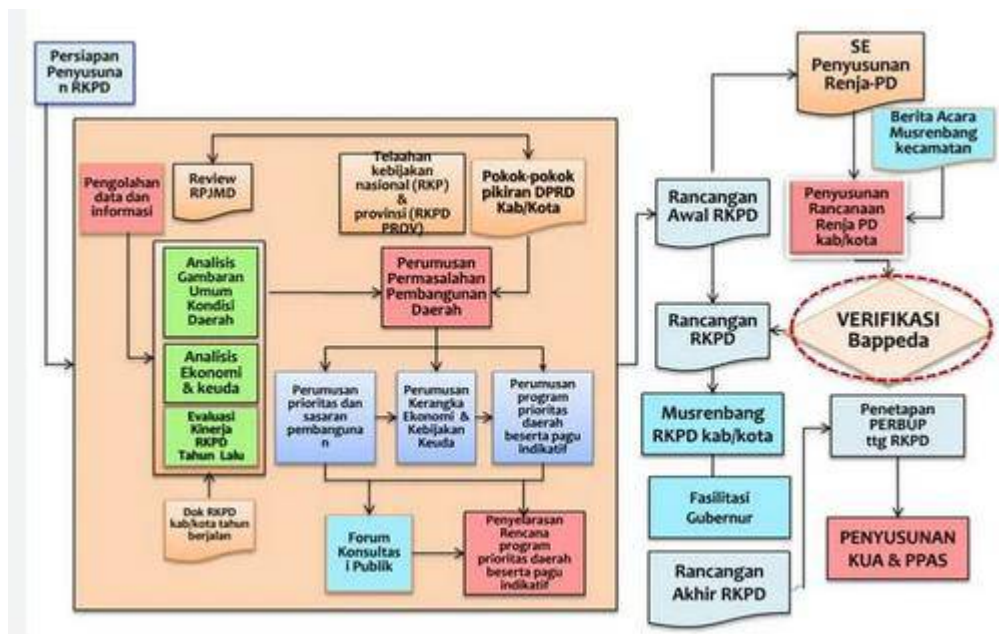
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang merupakan dokumen tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu menjembatani antara perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Pemalang secara substansial menjabarkan visi dan misi Bupati Pemalang dan Wakil Bupati Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun kedua periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang diselaraskan dengan perencanaan dan sasaran pembangunan Nasional. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Bagan alur penyusunan Renja SKPD



Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dengan melakukan Koordinasi, Sinergi dan Harmonisasi dengan Bapperida dan Pemangku kepentingan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan Renja
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja
3. Penyusunan Rancangan Renja
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja
6. Penetapan Renja

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yaitu:

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) yang telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 22. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845)
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395)
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi –Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161)
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

- Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
41. Peraturan Daerah kabupaten Pemalang nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 nomor 27);
43. Peraturan Bupati Pemalang nomor 23 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2023 Nomor 23)
44. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 nomor 32);

45. Peraturan Bupati Pemalang nomor 11 Tahun 2026 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2034 (Berita daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 Nomor 11);
46. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2027 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Selaras dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2027 yang disusun melalui prioritas program kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas program kegiatan dan sub kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2027 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah dan mempunyai fungsi yaitu Penyusunan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu.

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2027.
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2027 dapat tercapai.

- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2027.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2027 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2027 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2027 guna mencapai tujuan.
- d. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2027 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2027

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Pemalang Tahun 2027

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Memuat evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Memuat analisis kinerja pelayanan perangkat daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Memuat tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Bupati Pemalang

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Memuat program dan kegiatan hasil usulan masyarakat yang dapat dilaksanakan pada tahun 2027

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2027

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2027 beserta indikator Kinerja serta risiko prioritas Perangkat Daerah.

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama

Memuat Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

5.2 Indikator Kinerja Kunci

Memuat Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Jika ada).

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan catatan penting serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut dari penyusunan renja.

BAB II

**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG
TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

Dalam Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ke-sepuluh berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah kabupaten Pemalang nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi APBD penetapan sebesar Rp.5.793.276.400. Sedangkan pada perubahan anggaran mendapatkan tambahan sebesar Rp. 59.184.000., sehingga pagu anggaran perubahan sebesar Rp.5.852.460.400, dengan rincian sebagai berikut:

• Belanja Operasi	Rp. 5.509.560.400
• Belanja Modal	Rp. 342.900.000 +
Total	Rp. 5.852.460.400

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel II.1 dibawah ini :

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(4+6+8))	10= (9/3*100%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	- Nilai SAKIP								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, laporan kinerja dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai regulasi	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	0	2	2	100	2	4	40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	0	1	1	100	1	2	40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	0	1	1	100	1	2	40
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	0	1	1	100	1	2	40

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(4+6+8)$	$10=(9/3*100\%)$
	Dokumen DPA-SKPD								
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	0	1	1	100	1	2	40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	0	1	1	100	1	2	40
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	20	0	4	4	100	4	8	40
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan disusun sesuai regulasi	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	0	31	31	100	31	62	40
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	0	1	1	100	1	2	40
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	0	1	1	100	1	2	40

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(4+6+8))	10= (9/3*100%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	0	12	12	100	12	24	40
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425	0	25	36	144	100	136	32
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100	0	20	20	100	20	40	40

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(4+6+8)$	$10=(9/3*100\%)$
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	0	1	1	100	10	11	28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	0	12	12	100	12	24	40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	0	12	12	100	12	24	40
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145	0	29	29	100	29	58	40
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125	0	25	29	116	25	54	43

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(4+6+8)$	$10=(9/3*100\%)$
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	0	1	1	100	1	2	40
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100	0	20	20	100	20	40	40
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	100	0	20	20	100	20	40	40
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5	0	1	1	100	1	2	40
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta potensi Investasi	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5	0	1	1	100	1	2	40
Program Promosi penanaman Modal	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman	100	0	20	20	100	20	40	40

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(4+6+8)$	$10=(9/3*100\%)$
	modal								
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	0	1	1	100	2	3	33
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	10	0	2	2	100	2	4	40
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100	0	20	20	100	20	40	40
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25.000	0	4.000	11.359	283,9	4.500	15.859	63,4
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan	25	0	5	3	60	5	8	32

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5*100%)	8	9=(4+6+8))	10= (9/3*100%)
	Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	250	0	50	39	78	50	89	35
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	100	0	20	20	100	20	40	40
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	0	20	20	100	20	40	40
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60	0	12	1	8,3	12	13	21,6
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi	450	0	50	30	60	100	130	28,8

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2026	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2026	
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Raelisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	$7=(6/5*100\%)$	8	$9=(4+6+8)$	$10=(9/3*100\%)$
	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko								
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	260	0	20	81	405	60	141	54,2
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Profil Investasi Sektor Unggulan Daerah	100	0	20	20	100	20	40	40
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100	0	20	20	100	20	40	40
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	0	1	1	100	1	2	40

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dapat di kategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian relisasi target akhir renstra pada tahun 2025 rata-rata capainnya diatas 40%. Capaian paling tinggi ada pada subkegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan capaian akhir renstra pada tahun 2025 mencapai 63,4%, ini dikarenakan realisasi ijin terbit sebanyak 11.359 dari target 4.000 ijin terbit.

Untuk capain kinerja kurang baik ada pada subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan capaian akhir renstra di tahun 2026 sebesar 21,6%. Hal ini dikarnakan dari target penyelesaian permasalahan sebanyak 12 hanya ada 1 penyelesaian permasalahan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan atas Peraturan Daerah kabupaten Pemalang nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang mempunyai tugas Pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan pelayanan terpadu satu pintu pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pemalang menangani perijinan non berusaha sebanyak 23 jenis ijin. Sedangkan untuk perijinan berusaha menggunakan system OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2024 dan Tahun 2025 Sebagaimana tabel II.2

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Tabel II. 2 Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2024 dan 2025

No	Jenis Ijin	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Masuk	Terbit	Ditolak	Masuk	Terbit	Ditolak
1	Izin teraftar Pengobat Tradisional (STPT)	25	21	0	12	8	0
2	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	12	9	0	19	19	0
3	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	5	4		0	0	0
4	Izin Reklame						
	a. Izin Penyelenggaraan Reklame	471	471	0	482	482	0
	b. Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	13	9	0	11	8	0
5	Izin operasional Lembaga kesejahteraan social (LKS)/ Panti	4	5	0	4	1	0
6	Izin Pemakaman	17	17	0	21	21	0
7	Izin Krematorium	12	12	0	16	16	0
8	Izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan	6	4	0	0	0	0
9	Izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan Non Formal	3	2	0	5	5	0
10	Izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	3	3	0	3	3	0
11	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0	0	0	0
12	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0	0	0	0
13	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
14	Surat Izin Tukang Gigi				0	0	0
15	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	30	25		29	29	0
16	Izin Insidentil	0	0	0	0	0	0
17	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	12972	12973	0	10.885	10.885	0
18	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0	0	0	0
19	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha	92	74	0	79	75	0
20	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	12	13		8	7	0
21	Izin Operasional Klinik	0	0	0	1	1	0
22	Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	0	0	0	1	1	0
23	Sertifikat laik Higiene Sanitasi Jasa Boga (SPPG)	0	0	0	63	60	0
	JUMLAH	13.677	13.642	0	11.639	11.621	0

Capaian realisasi perijinan Non OSS pada Tahun 2025 cukup baik dengan realisasi sebanyak 11.621 izin terbit. Izin paling banyak terbit terdapat pada izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro yang mencapai 10.885 Izin terbit.

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang. Salah satu indikator kinerjanya adalah terkait peningkatan investasi di Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2025 target investasi sebesar Rp.246.578.462.891 dengan realisasi investasi sebesar Rp. 252.451.320.096 atau capaiannya sebesar 102,38%. Sedangkan untuk realisasi nilai SKM sangat baik karna dapat memperoleh nilai 89,95 dari target 89,80. Realisasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Tabel III. 1 Capaian Kinerja

No	Indikator	SPM* nasio nal	IKU	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten		Meningkatnya investasi di kabupaten	12%	15%	16%	14,67	-	15%	16%	
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal		Meningkatnya realisasi investasi di kabupaten	246.578 .462.89 1	290.319 .018.11 0	336.770 .061.00 8	252.451 .320.09 6	-	290.319 .018.11 0	336.770.0 61.008	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh		Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	89,80	89,97	89,99	89,95	90	89,97	89,99	
4	Nilai SAKIP			69,46	69,75	69,85	69,46	70,35	69,75	69,85	
5	Realisasi Total terhadap Target Investasi			100	100	100	102,38	25	100	100	
6	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan			100	100	100	100	25	100	100	
7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan			100	100	100	100	5	100	100	
8	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha			100	100	100	100	25	100	100	
9	Persentase Ketersediaan profil investasi daerah			100	100	100	100	25	100	100	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)			12,38			12,15	-	12,38		

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

2.3.1 Permasalahan dan hambatan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mempunyai satu urusan yaitu Penanaman Modal. Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang dihadapi adalah :

1. Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu tempat dan pelaksanaan pelayanan di MPP belum maksimal (MPP belum mengakomodir seluruh instansi yang ada).
2. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terkait perijinan online OSS (Online Singel Submission).
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam peralihan sistem dari OSS v.1.1. menjadi OSS-RBA.
4. Belum diimplementasikannya pemberian insentif bagi investor.
5. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi.
6. Adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) mempengaruhi proses investasi yang akan masuk di Kab. Pemalang.
7. Terhambatnya proses perijinan melalui OSS RBA karena sampai saat ini belum tersusunnya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) akibat adanya kebijakan LSD.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang periode Tahun 2025 – 2029.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka peluang investor untuk masuk ke Kabupaten Pemalang semakin terbuka lebar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang perlu

meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana dalam memberikan pelayanan terhadap Investor.

2.3.2 Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Dengan ada perubahan regulasi yang didukung oleh kemudahan berusaha akan meningkatkan aktivitas investasi di daerah.

Isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Amanat Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengharuskan setiap Kabupaten/Kota mempunyai Mal Pelayanan Publik Digital. MPP Digital menjadi bagian dari Portal Nasional Pelayanan Publik yang terdiri atas : Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan Lembaga, dan Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalam Provinsi tersebut. Saat ini terdapat 19 instansi pemerintah baik vertikal maupun horisontal yang telah berpartisipasi menempatkan petugasnya dalam MPP Kabupaten Pematang Jaya.

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Tabel II. 3 Analisis SWOT

ISU STRATEGIS	KEKUATAN (STRENGHT) 1. Potensi peluang investasi di berbagai sektor dan daya dukung investasi di Kabupaten Pemalang 2. Ditetapkannya Kawasan Peruntukan Industri melalui Perda Kabupaten Pemalang No 1 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018-2038 3. Tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Investasi (Gerai Investasi)	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Upaya peningkatan promosi penanaman modal investasi belum optimal dalam rangka meningkatkan penanaman modal 2. Upaya meningkatkan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya 3. Belum optimalnya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam mal pelayanan publik
PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Dukungan Pemerintah melalui terbitnya UU Cipta Kerja 2. Pengembangan Mall Pelayanan Publik 3. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat sebagai media promosi Penanaman Modal	STRATEGI SO 1. Peningkatan Promosi Penanaman Modal 2. Peningkatan Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	STRATEGI WO 1. Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi 2. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
TANTANGAN (THREAT) 1. Masih adanya konflik kepentingan baik social ekonomi maupun lingkungan dalam pelaksanaan penanaman modal 2. Belum memadainya data dan informasi terkait profil dan peluang investasi, lahan dan peta kawasan peruntukan industri serta infrastruktur pendukungnya 3. Tidak terkendalinya harga tanah pada kawasan peruntukan industri	STRATEGI ST 1. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	STRATEGI WT 1. Meningkatkan kegiatan promosi di media sosial, surat kabar dan radio. 2. Melakukan update data profil investasi setiap tahun. 3. Memaksimalkan mal pelayanan public dengan terus menambah tenan pelayanan agar pada ahirnya seua pelayanan dapat di layani di mal pelayanan public.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu :

Visi : “PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”

Dalam mewujudkan Visi tersebut, terdapat 8 (delapan) Misi sebagai berikut :

1. **Misi 1 Resik:** menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
2. **Misi 2 Hijau:** meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
3. **Misi 3 Apik:** meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
4. **Misi 4 Peduli:** meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
5. **Misi 5 Silaturahmi:** meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
6. **Misi 6 Organisatoris:** meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
7. **Misi 7 Digitalisasi:** memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.
8. **Misi 8 Ikhlas:** menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Berdasarkan cita-cita pembangunan daerah Kabupaten Pemalang periode 2025-2029 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Visi “**CAKAP** dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional.” dan mendukung Misi RPJMD yang ke 3 (Tiga) yaitu “**APIK:** Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah”.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang yaitu “**Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pemalang**”.

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2027 keterkaitan Isu Strategis , prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diarahkan pada **“Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM”**.

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah Peningkatan Investasi yang dititikberatkan pada kemudahan pelayanan perijinan dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP).

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun program, Kegiatan dan sub kegiatan masih mengacu pada program dan kegiatan tahun 2027.

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Tabel II. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PMPTSP	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 69,80 - 89,98	5.093.883.400	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PMPTSP	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 69,80 - 89,98	5.093.883.400	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai regulasi	100%	58.466.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai regulasi	100%	58.466.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.347.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.347.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.616.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.616.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.687.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.687.250	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.379.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.379.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.456.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.456.500	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase dokumen keuangan disusun sesuai regulasi	100%	4.112.869.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase dokumen keuangan disusun sesuai regulasi	100%	4.112.869.750	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ tahun	4.109.924.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ tahun	4.109.924.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.496.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.496.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.449.750	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.449.750	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	100%	192.723.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	100%	192.723.100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.047.450	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.047.450	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.183.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.183.250	
	Penyediaan Barang Cetak dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	12 Paket	12.991.690	Penyediaan Barang Cetak dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan	12 Paket	12.991.690	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penggandaan		Disediakan			Penggandaan		Penggandaan yang Disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	634 Dokumen	3.804.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	634 Dokumen	3.804.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	109.681.710	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	109.681.710	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	43.500.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	43.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	43.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	43.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	554.653.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	554.653.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	394.053.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	394.053.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Dinas PMPTSP	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100%	131.670.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Dinas PMPTSP	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	131.670.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintah Daerah		dipelihara			Pemerintah Daerah		daerah yang dipelihara			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	48.524.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	48.524.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	51.660.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	51.660.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	31.486.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	31.486.000	
	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	4.870.000	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	4.870.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	100%	2.430.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	100%	2.430.000	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	2.430.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	2.430.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta otensi Investasi	100%	2.440.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta otensi Investasi	100%	2.440.000	
	Penyusunan Rencana Umum	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum	1 Dokumen	2.440.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum	1 Dokumen	2.440.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Modal Daerah Kabupaten/Kota		Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Promosi penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	100%	185.920.000	Program Promosi penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	100%	185.920.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	100%	185.920.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	100%	185.920.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	96.420.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	96.420.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	89.500.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	89.500.000	
	Program pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000	Program pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	secara Elektronik							Terintegrasi secara Elektronik			
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5.000.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	15.000.000	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	100%	38.135.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	100%	38.135.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	38.135.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	38.135.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha	2.100.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	1 Kegiatan Usaha	2.100.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi	10 Pelaku Usaha	4.650.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi	10 Pelaku Usaha	4.650.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	31.385.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	31.385.000		
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	100%	25.000.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	100%	25.000.000		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000		
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	25.000.000		
JUMLAH TOTAL					5.422.808.400						5.422.808.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Pemalang nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal dengan fungsi Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan admistrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Usulan program dan kegiatan masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berasal dari 2 item, yang pertama dari tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan yang kedua dari hasil pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2027. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Survei Kepuasan Masyarakat dan *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 :

Tabel II. 5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Usulan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Catatan
1	Kurangnya sosialisasi prosedur perizinan	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	Survey IKM
2	Kurangnya pemahaman pemohon terhadap prosedur perizinan	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha	Survey IKM
3	Belum terintegrasinya seluruh pelayanan perijinan pusat, daerah, BUMN, BUMD dan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Forum FGD

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

	swasta dalam satu tempat dan pelaksanaan pelayanan di MPP belum maksimal (MPP belum mengakomodir seluruh instansi yang ada).			
4	Amanat MCSP KPK SOP dan SPP Dpmptsp wajib membentuk Perbup/ Perkada	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Forum FGD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan RPJMN 2025-2029, Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Visi Presiden 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Tujuh agenda pembangunan nasional yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, memperhatikan Nawa Cita Kedua tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk tahun 2027 yaitu **“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”**.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 67 salah satunya berbunyi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Program strategis nasional yang dimaksud adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan program strategis nasional di daerah adalah penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan program strategis lainnya. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinttu Kabupaten Pemalang dalam hal ini mendukung program strategis pertumbuhan ekonomi dengan indikator kemudahan perizinan yang meliputi :

1. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha di daerah telah sesuai dengan ketentuan
2. Peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dan Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor
3. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Laporan Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
4. Penyediaan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan pada

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

5. Pencapaian nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai target
6. Inovasi untuk mempercepat kemudahan perizinan di daerah

2. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam rangka mencapai strategi pembangunan jangka menengah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD maka pentahapan pembangunan tahun 2027 dilaksanakan dengan prioritas Pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan pembangunan pariwisata;
2. Penguatan industrialisasi bidang pertanian dan perikanan;
3. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. Peningkatan investasi;
5. Penguatan infrastruktur berkelanjutan;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
7. Penguatan penanganan kemiskinan;
8. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Penguatan tata kelola pemerintahan.

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2027, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah Peningkatan Investasi dengan Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global dan Peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian hukum dan transparansi proses perizinan serta Implementasi pemberian insentif penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pemalang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dan Sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintah Daerah dalam mendukung Pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati Pemalang. Perwujudan Pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana

Kerja Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi ke 3 yaitu “APIK: Meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah “ Dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebutkan salah satu prioritas pembangunan Tahun 2027 adalah Peningkatan Investasi dengan Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global dan Peningkatan kualitas pelayanan perijinan melalui kecepatan, kemudahan, kepastian hukum dan transparansi proses perizinan serta Implementasi pemberian insentif penanaman modal untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Pemalang.

Tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dari sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan tujuan DPMPTSP Kabupaten Pemalang yaitu “Meningkatnya Investasi di Kabupaten Pemalang” dengan dua sasaran yang pertama Meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten dan Meningkatkan kinerja pelayanan dan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah yang menjadi bidangnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang juga mendukung prioritas daerah dalam peningkatan kondusivitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah melalui program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan nilai

investasi penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan informasi tentang peta potensi penanaman modal di kabupaten pemalang.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan Pemerintahan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, dan 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawas, 1 (satu) unsur kewilayahan yang terdiri dari 14 Kecamatan, dan 1 (satu) unsur Pemerintahan umum. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2027 yaitu mengampu **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal**.

Rumusan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka rencana program yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 - 3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
- e. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 3) Pengawasan Penanaman Modal
- f. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga program berarti kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada tahun 2027 sebanyak 6 (enam) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan adalah perwujudan dari program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku (fleksibel).

Lebih lanjut bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentunya mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah sebagaimana pada Tabel IV. 2 di bawah ini.

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Tabel IV. 1 Matrik Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PMPTSP	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 69,80 - 89,98	4.928.698.400	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas PMPTSP	- Nilai SAKIP - Nilai IKM	- 69,80 - 89,98	4.928.698.400	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai regulasi	100%	58.466.750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai regulasi	100%	58.466.750	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.347.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.347.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.616.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.616.500	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.687.250	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.687.250	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.379.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.379.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.456.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	4.456.500	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.136.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	39.844.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase dokumen keuangan disusun sesuai regulasi	100%	4.112.869.750	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase dokumen keuangan disusun sesuai regulasi	100%	4.112.869.750	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/tahun	4.109.924.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas PMPTSP	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/tahun	4.109.924.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.496.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.496.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.449.750	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.449.750	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	100%	154.226.636	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai regulasi	100%	154.226.636	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.047.450	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.047.450	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	56.368.496	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket	56.368.496	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting	
Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
							Disediakan				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.991.690.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas PMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.991.690.		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	634 Dokumen	3.804.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	634 Dokumen	3.804.000		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.015.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	75.000.000		
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	50.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	50.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	515.645.264	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	515.645.264		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	364.645.264	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	364.645.264		

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	105.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	105.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas PMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	45.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas PMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	
Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	4.860.000	Program Pengembangan Iklim penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100%	4.860.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	100%	2.430.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terselenggaranya kegiatan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	100%	2.430.000	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	2.430.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	2.430.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta otensi Investasi	100%	2.430.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan kajian peta otensi Investasi	100%	2.430.000	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.430.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.430.000	
Program Promosi penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	100%	175.000.000	Program Promosi penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase promosi di tingkat regional dan/atau nasional yang dilaksanakan	100%	175.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	100%	175.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal	100%	175.000.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	75.000.000	
Program pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000	Program pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100%	75.000.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase terlaksananya kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	75.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kabupaten/Kota										
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4.000 Pelaku Usaha	55.000.000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5.000.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	5.000.000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	15.000.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	30 Kegiatan Usaha	15.000.000	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	100%	36.750.000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	100%	36.750.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	36.750.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Prosentase terselenggaranya pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	36.750.000	
Penyelesaian Permasalahan dan	Dinas PMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan	1 Kegiatan	2.100.000	Penyelesaian Permasalahan dan	Dinas	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan	1 Kegiatan	2.100.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Usaha		Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	PMPTSP	Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Usaha		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	10 Pelaku Usaha	4.650.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas PMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	10 Pelaku Usaha	4.650.000	
Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	30.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	30.000.000	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	100%	25.000.000	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Persentase Ketersediaan Profil Investasi sektor unggulan daerah	100%	25.000.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPTSP	Persentase tersusunnya Data/ Informasi Pelayanan Perizinan	100%	25.000.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	25.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis	Dinas PMPTSP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	1 Dokumen	25.000.000	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Rencana Tahun 2027					Perkiraan Maju Tahun 2028					Catatan Penting
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
				5.312.808.400					5.312.808.400	

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2027 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam menunjang Tugas dan Fungsinya serta mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Pemalang serta target dari tujuan dan sasaran Pemangunan Daerah.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 disusun sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan IKU Tahun 2027 mengacu pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025. Dengan demikian, indikator yang ditetapkan diharapkan mampu menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berikut adalah rumusan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang periode tahun 2027 :

Tabel V. 1 Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Investasi di Kabupaten	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	%	16
			Nilai realisasi penanaman modal	Rp/ Tahun	336.770.061.007
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Niali Sakip dan Nilai IKM	Nilai	90,50 70,50

5.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikaor kinerja kunci (IKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian suatu target atau tujuan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun kinerja organisasi. Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 indikator kinerja kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

RENJA DPMPTSP TAHUN 2027

Pemalang sama dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel V. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	%	12,00	12,25	12,50	12,75	13,00	13,25	

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2027.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

Pemalang, 10 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn

Pembina Utama Muda

NIP. 19680908 199803 1 003